

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2024



Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Sambas



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2024 dapat disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Sejalan dengan kondisi tersebut, LAKIP yang kami susun berusaha melaporkan program/kegiatan yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya, sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dan sekaligus sebagai wujud komitmen instansi serta aparatur di Lingkungan Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan



Hewan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa LAKIP yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, meskipun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap LAKIP yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan “*Good Governance*” di Lingkungan Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sambas pada umumnya.

Sambas, Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN KABUPATEN SAMBAS



HENDY WIJAYA, S.K.M., M.PH

Pembina Utama Muda

NIP.19690824 198911 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat daerah.....	1
B. Permasalahan Utama Organisasi.....	8
C. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	9
D. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis (<i>Renstra</i>) Tahun 2021-2026	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Perangkat daerah	20
B. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama..	23
C. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan Umum.....	37
B. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja.....	37



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumberdaya Aparatur Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2024.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	18
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.....	24
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Program Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2024	25
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2024.....	30
Tabel 3.5 Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024.....	31
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	4



BAB I PENDAHULUAN

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*) diperlukan suatu media pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka visi, misi dan tujuan organisasi/ instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra. Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, maka Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud.

A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Dalam kedudukannya sebagai sub sistem dalam Tata Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan, peternakan dan Kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam



Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021, tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021, maka Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas mempunyai tugas antara lain :

- a. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok sesuai lingkup kewenangannya, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, peternakan dan Kesehatan hewan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami pembaharuan SOTK yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

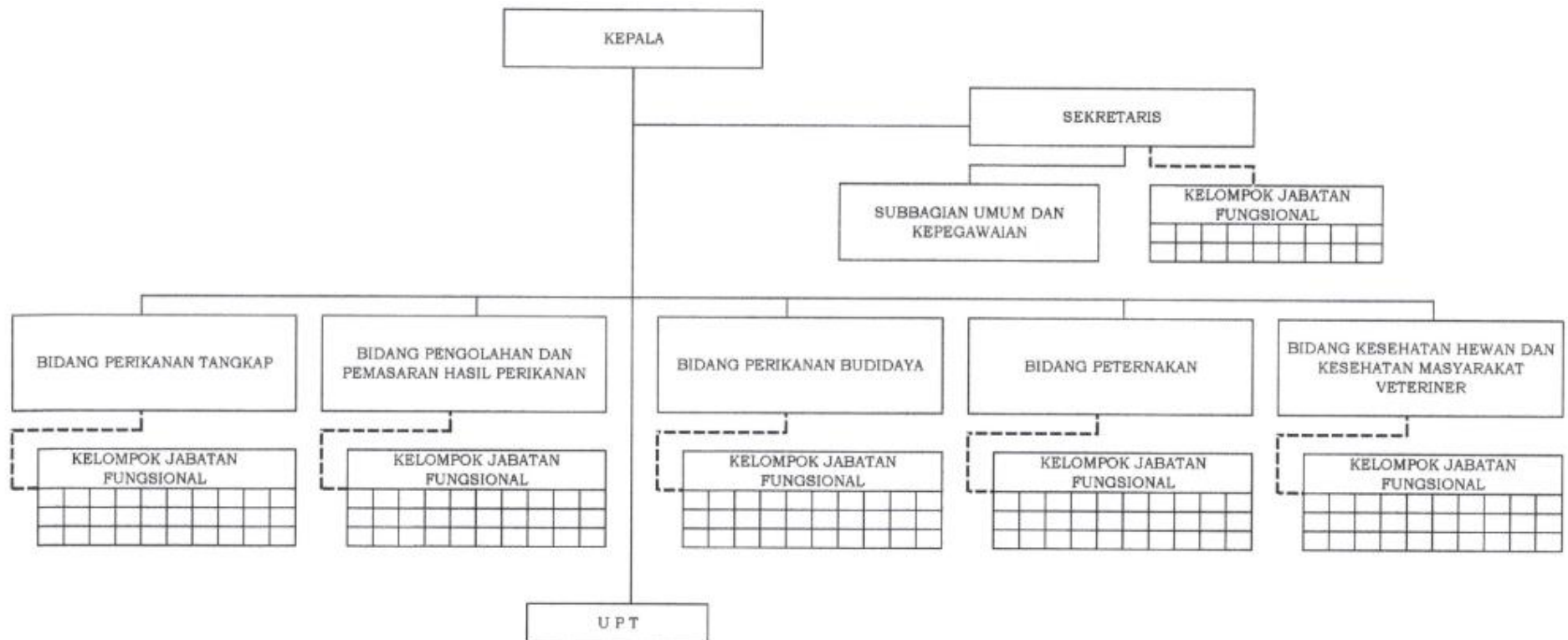
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Peternakan;
- g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kondisi sumber daya manusia (SDM) aparatur, sarana dan prasarana kerja, sumber pendanaan dan lain-lain.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas





Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi RPJMD, dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kondisi sumber daya manusia (SDM) aparatur, sarana dan prasarana kerja, sumber pendanaan dan lain-lain.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 80 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumberdaya Aparatur Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2024

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5
1	Hendy Wijaya, S.K.M., M.PH 19690824 198911 1 001	Pembina Utama Muda / IV.c	Kepala Dinas	S2
2	Junihardy, S.Pi 19760626 200212 1 010	Pembina Tk.I / IV.b	Sekretaris	S1
3	Makbullah, S.PT, MP 19720903 199803 1 009	Pembina / IV.a	Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmavet	S2
4	Friyanto, S.Pt 19710215 199903 1 006	Pembina / IV.a	Kabid Peternakan	S1
5	Zulfian, S.Pt 19720826 200212 1 006	Pembina / IV.a	Kabid Perikanan Tangkap	S1
6	U. Azharie, S.Pi 19761010 200212 1 009	Pembina / IV.a	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	S1
7	Isnul Aprinda, S.Pi, MT 19800428 200502 1 002	Pembina / IV.a	Kabid Perikanan Budidaya	S2
8	Ahmad Pauji 19680709 199403 1 009	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Perikanan	SLTA
9	Purwadi, S.ST 19740407 199403 1 004	Penata Tk.I /III.d	Medik Veteriner	D4
10	Hidayat, S.Pi 19721025 200312 1 004	Penata Tk. I/III d	Pengawas Perikanan	S1
11	Gusti Alimsyah, S.Pi 19710119 200312 1 006	Penata Tk. I/III d	Analisis Akuakultur	S1



12	M. Tommy Rizal, S.Pt 19751017 200502 1 002	Penata Tk. I/III d	Medik Veteriner	S1
13	Eka Martini, S.Pt 19790317 200502 2 002	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Bibit Ternak	S1
14	Agus Ishardi, S.St.Pi 19790828 200604 1 007	Penata Tk.I /III.d	Perencana	D.IV
15	Al Amrusi, S.Pi 19801014 200803 1 002	Penata Tk.I /III.d	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	S1
16	drh. Maria Gratia 19831006 200803 2 001	Penata Tk.I /III.d	Medik Veteriner	S2
17	Deli Daliyana, S.St.Pi 19790628 200312 2 006	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Perikanan	D4
18	Adi Roja Suryo Pranoto, S.St.Pi 19760723 200312 1 006	Penata Tk.I /III.d	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	D4
19	Novi Priyanti, S.Pi 19851119 200902 2 005	Penata Tk.I /III.d	Pengelola Kesehatan Ikan	S1
20	Haliza, S.Pt 19810501 200902 2 005	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Bibit Ternak	S1
21	Darmawansyah, S.IP 19780911 200312 1 009	Penata / III.c	Analisis Pengelolaan Keuangan	S1
22	Hamika, S.Hum 19820828 200701 1 008	Penata Muda Tk.I / III.b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
23	Hermani, S.H 19680513 200501 1 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengelola Barang Milik Daerah	S1
24	Kenedi, S.Hum 19730527 200312 1 003	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengawas Mutu Bibit Ternak	S1
25	Femy Chindi Rilau, S.P 19920206 201902 2 004	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengawas Mutu Bibit Ternak	S1
26	Subaktina 19670520 200604 2 009	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Perizinan	SLTA
27	Maulidi 19780612 200701 1 020	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Izin Usaha	SLTA
28	Sri Rahayu 19790209 200701 2 013	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA
29	Rully, S.P 19851008 200502 1 002	Penata Muda / III.a	Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	S1
30	Imam Pratama, S.Pi 19910515 202012 1 007	Penata Muda / III.a	Analisis Perikanan Budidaya	S1



31	Adha Kurniawan, S.St.Pi 19900702 202203 1 002	Penata Muda / III.a	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	D.IV
32	Candra Roji, S.Pt 19950504 202203 1 003	Penata Muda / III.a	Pengawas Mutu Pakan	S1
33	Kamal 19821110 200701 1 009	Pengatur Tk. I / II.d	Bendahara Pengeluaran	SLTA
34	Supliadi 19720616 200801 1 012	Juru Tk.I / I.d	Pramu Kebersihan	SD
35	Afner 19790722 200801 1 021	Juru Tk.I / I.d	Pramu Bakti	SD
41	Guruh Ertiyasa, S.Pi		Honorar	S1
42	Vindo Lesmana, S.Pt		Honorar	S1
43	Elwin, S.Pt		Honorar	S1
44	Ilham Ramananda, S.Pi		Honorar	S1
45	Sahni, S.Akun		Honorar	S1
46	Kurniawati, S.Tr.Ak		Honorar	D.IV
47	Sepriyadi, S.Tr.Pi		Honorar	D.IV
48	Bagus Pramuja, S.Tr.Pi		Honorar	D.IV
49	Alza Winalda, S.Tr.Pi		Honorar	D.IV
50	Yesi Agustini, A.Md		Honorar	D.III
51	Ria, A.Md		Honorar	D.III
52	Nazarhan, A.Md		Honorar	D.III
53	Alvi Maudi, A.Md		Honorar	D.III
54	Arie Pariyanto, A.Md		Honorar	D.III
55	Sri Mulyani, A.Md		Honorar	D.III
56	Tan Irfan, A.Md		Honorar	D.III
57	Dino Sariono, A.Md		Honorar	D.III
58	Rifky Surista, A.Md		Honorar	D.III
59	Raden Namira Kesuma, A.Md		Honorar	D.III
60	Deki Haryanto		Honorar	SLTA
61	Mualimnur		Honorar	SLTA
62	Muhammad Nopianto		Honorar	SLTA
63	Surya Mandiri Zed		Honorar	SLTA
64	Robiansyah		Honorar	SLTA
65	Egi Vebrianto		Honorar	SLTA
66	Nusi		Honorar	SLTA
67	Maulidin		Honorar	SLTA
68	Syukur		Honorar	SLTA
69	Wan Alam Nur Qomar		Honorar	SLTA
70	Agus Poniman		Honorar	SLTA



71	Agung Setyawan Waluyoajati		Honorar	SLTA
72	Kasianus Buyung		Honorar	SLTA
73	Muhamad Nur		Honorar	SLTA
74	Harfendi		Honorar	SLTP
75	Apri Yono		Honorar	SLTP
76	Bambang		Honorar	SD

5. Sarana dan Prasarana

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, garasi dll) dan barang bergerak (sarana mobilitas/ kendaraan, komputer, audio visual, perlengkapan internet, brankas dll).

6. Sumber Dana

Dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan adalah sebesar Rp 16.220.578.514,00 yang terdiri dari Rp 13.827.768.214,00 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp 2.510.150.000,00 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

B. Permasalahan Utama Organisasi

DPPKH Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh DPPKH Kabupaten Sambas adalah :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- b. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.



- c. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan.
- d. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi,
- e. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKH yang masih perlu ditingkatkan.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana organisasi.

Untuk mengatasi masalah diatas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- b. Meningkatkan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- c. Mengurangi kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informaasi.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKH.
- f. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana organisasi.

C. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;



- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024.
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

LAKIP berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja, selanjutnya berfungsi sebagai sarana evaluasi atas percepatan kinerja sesuai dengan target dan capaian hasil kinerja yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi perencanaan untuk masa yang akan datang.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja DPPKH pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Strategis ini disusun dengan menggabungkan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang meliputi penetapan tujuan, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif *stakeholder*, *internal bussiness process*, *learning* dan *growth* serta *finacials* sehingga mampu memenuhi keinginan *stakeholder* untuk bisa mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dimasa depan, membangun operasi serta prosedur dalam mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya dengan menggunakan lima tolak ukur, antara lain masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) serta dampak (*impact*).

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefenisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi pembangunan daerah hanya dapat direalisasikan dalam bentuk misi pembangunan daerah yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan kedalam tujuan serta sasaran strategis DPPKH Kabupaten Sambas berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi khusus yang ingin dicapai oleh DPPKH Kabupaten Sambas dalam konsepsi yang lebih operasional dalam suatu strategi. Perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa program kegiatan ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan kedalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja untuk satu tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran DPPKH Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strateginya.



Rencana Strategis DPPKH Kabupaten Sambas disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah, arah kebijakan serta prioritas daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan juga disertai dengan indikator kegiatan berdasarkan bidang kewenangan dan arah kebijakan pembangunan. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan secara periodik perlunya upaya penyempurnaan/revisi baik secara parsial maupun menyeluruh jika ditemukannya suatu perubahan lingkungan strategis yang signifikan. Kondisi ini diperlukan agar mampu beradaptasi serta merespon terhadap suatu perkembangan yang begitu dinamis, baik pada aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Berkemajuan” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006-2011), lima tahun kedua (tahun 2012- 2016), lima tahun ketiga (2016-2021), serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah Tahun 2021-2026 adalah : “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Perumusan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut :

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, beriman dan takwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang *good and clean Government*.
2. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang ditandai dengan tercapai swasembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatan investasi.
3. Maju adalah suatu kondisi dimana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya makmur dan maju. ditandai dengan berjalannya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai.



4. Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Agamis Pada Semua Lini Kehidupan Dalam Bingkai Persatuan Antar Elemen Masyarakat.
2. Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal dan Investasi Berbasis Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri dan Bidang Lainnya.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Intelektual, Kreatif, Inovatif, Dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui program prioritas dan pernyataan Misi ke 2 yaitu Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal dan Investasi Berbasis Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri dan Bidang Lainnya.

Mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026, serta berdasarkan Renstra DPPKH Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, maka DPPKH Kabupaten Sambas menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Adapun tujuan DPPKH Kabupaten Sambas adalah:



1. Peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan).
2. Peningkatan produksi peternakan.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran DPPKH Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan).
2. Meningkatnya produksi peternakan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, Indikator Kinerja yang ingin dicapai secara bertahap sampai akhir 2024 adalah :

1. Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan).
2. Persentase peningkatan poduksi peternakan.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Sambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan)	Meningkatkan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan)	Persentase Peningkatan produksi perikanan (Tangkap, Budidaya, Pengelolaan)	23.830 Ton (22,59%)	24.100 Ton (23,73%)	24.370 Ton (24,88%)	24.640 Ton (26,02%)	24.910 Ton (27,17%)
2	Peningkatan produksi peternakan	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan	6.670 Ton (12,30%)	6.747 Ton (13,47%)	6.819 Ton (14,57%)	6.896 Ton (15,75%)	6.968 Ton (16,84%)



Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, untuk tahun 2024 dilaksanakan 7 (Tujuh) program utama yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Lebih lanjut dalam pelaksanaan 7 (tujuh) program utama tersebut, dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan Sub Kegiatan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, DPPKH Kabupaten Sambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala DPPKH Kabupaten Sambas Nomor 050 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi perikanan (Tangkap, Budidaya, Pengolahan)	Persentase Peningkatan produksi perikanan (Tangkap, Budidaya, Pengolahan)	$\left(\frac{(\text{Produksi Tahun } n - \text{Produksi Tahun } 0)}{\text{Produksi Tahun } 0} \times 100\% \right) + \text{Persentase Tahun } 0$



2	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan	$\left(\frac{(\text{Produksi Tahun } n - \text{Produksi Tahun } 0)}{\text{Produksi Tahun } 0} \times 100\% \right) + \text{Persentase Tahun } 0$
---	----------------------------------	--	---

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara Bupati Kabupaten Sambas dengan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPPKH Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
DPPKH Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan)	Persentase Peningkatan produksi perikanan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan)	24.370 Ton (24,88%)
2.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan	6.819 Ton (14,57%)



Program		Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.165.973.410,00
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	5.097.678.268,00
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	2.521.530.580,00
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp.	217.790.868,00
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil perikanan	Rp.	809.495.829,00
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	1.026.959.559,00
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	381.150.000,00
TOTAL	Rp.	16.220.578.514,00

Total anggaran DPPKH Kabupaten Sambas bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 10.054.605.104,00 atau 61,99% dari total anggaran saat penyusunan perjanjian kinerja sebesar Rp 16.220.578.514,00.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*, sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya



dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Sambas belum dapat dilaksanakan secara lengkap mengingat lembaga ini masih memiliki keterbatasan personil serta masih minimnya kualitas personil. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, di gunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X \geq 85$	▶ Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	▶ Berhasil
$55 < X \leq 70$	▶ Cukup Berhasil
$X \leq 55$	▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil. Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana :

n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran



f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori Sangat Berhasil (SB), Berhasil (B), Cukup Berhasil (CB), dan Tidak Berhasil (TB).

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga evaluasi kinerja mampu menunjukkan penyebab ketidakberhasilan ataupun kegagalan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mana hasil evaluasinya disajikan dalam Laporan Kinerja.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Akuntabilitas kinerja DPPKH Kabupaten Sambas dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan.

Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia di DPPKH Kabupaten Sambas karena keberhasilan program dan kegiatan tersebut begitu tergantung dari sumber daya aparatur yang tersedia serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna.

DPPKH Kabupaten Sambas melaksanakan tugas-tugas urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendorong



percepatan pembangunan perekonomian di segala sektor didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis DPPKH Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Kinerja
1	Meningkatnya Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan)	Persentase Peningkatan produksi perikanan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan)	24.370 Ton 24,88%	53.218,99 Ton 147,30%	218,63%
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan	6.819 Ton 14,57%	6.819,42 Ton 14,58%	100,01%

Dari tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi capaian produksi tahun berkenaan dengan target produksi tahun berkenaan, sehingga didapatkan persentase kinerja pada setiap sasaran strategis. Hal ini dapat dilihat pada sasaran strategis pertama yakni meningkatnya produksi perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan) mempunyai capaian kinerja 218,63% dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan pada sasaran strategis kedua yakni meningkatnya produksi peternakan mempunyai capaian kinerja sebesar 100,01% dengan kategori Sangat Berhasil.

Adapun persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan) pada tahun 2024 ialah 147,30% dengan realisasi produksi sebesar 53.218,99 Ton, lebih tinggi jika dibandingkan target persentase peningkatan produksi perikanan yaitu sebesar 24,88% dan target produksi sebesar 24.370 Ton. Tingginya realisasi capaian produksi perikanan didukung oleh tingginya jumlah produksi di sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sedangkan persentase



peningkatan produksi peternakan pada tahun 2024 ialah sebesar 14,58%, lebih tinggi jika dibandingkan target persentase peningkatan produksi peternakan sebesar 14,57%.

Selain pengukuran capaian kinerja strategis, DPPKH Kabupaten Sambas juga melakukan pengukuran kinerja terhadap program yang dilaksanakan selama tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat pencapaian kinerja program DPPKH Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2024

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	22.030 Ton	49.894,57 Ton	226,48%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.340 Ton	3.218,92 Ton	137,56%
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang Dibina	3 POKMASWAS / Tahun	3 POKMASWAS / Tahun	100,00%
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan	205 Ton	166,41 Ton	81,18%
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	3.677.486 Ekor	3.449.393 Ekor	93,80%



7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	60%	60%	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja					117%

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program DPPKH Kabupaten Sambas selama tahun 2024 ialah sebesar 117% dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 program memiliki capaian kinerja di atas 100%, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Namun terdapat 2 program memiliki capaian kinerja di bawah 100%, yaitu Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian. Tidak tercapainya indikator Jumlah Produksi Pengolahan pada Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan disebabkan oleh panjangnya musim hujan di tahun 2024 sehingga masyarakat kesulitan menjemur hasil olahan ikan. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya jumlah produksi pengolahan hasil perikanan. Sedangkan tidak tercapainya target Jumlah Populasi Ternak pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian disebabkan masih adanya penyakit hewan menular ternak yang berpengaruh terhadap penurunan populasi ternak di Kabupaten Sambas.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis DPPKH selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.



Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Realisasi					Tahun 2020-2024					
			2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan)	Persentase Peningkatan produksi perikanan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan)	14.408,00	14.408,00	23.830,00	24.100,00	24.370,00	21.741,26	19.540,81	23.566,00	42.088,07	39.564,95	53.218,99	135,62%	163,56%	176,62%	164,17%	218,38%
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan	3.750,00	3.860,00	6.670,00	6.747,00	6.819,00	7.375,21	6.827,83	6.560,00	6.637,26	6.939,63	6.802,62	182,08%	169,95%	99,51%	102,86%	99,76%



Masalah dan Kendala

Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian produksi pada tahun 2023 yaitu sebesar 164,17% dan capaian produksi tahun 2024 sebesar 218,38%. Adapun realisasi jumlah produksi perikanan tahun 2024 ialah sebesar 53.218,99 Ton, lebih tinggi jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2024 sebesar 24.370 Ton. Capaian jumlah produksi perikanan mengalami peningkatan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian jumlah produksi pada tahun 2023, yaitu dari jumlah produksi sebesar 39.564,95 Ton pada tahun 2023 menjadi 53.218,99 Ton pada tahun 2024. Tingginya jumlah produksi perikanan didukung oleh tingginya jumlah produksi pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Namun dari sektor pengolahan dan pemasaran perikanan, terjadi penurunan yang disebabkan oleh panjangnya musim penghujan di tahun 2024 sehingga masyarakat kesulitan mengeringkan produk hasil olahan ikan.

Sasaran strategis meningkatnya produksi peternakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni dari 102,86% menjadi 99,76%. Realisasi produksi peternakan pada tahun 2024 ialah sebesar 6.802,62 Ton, lebih tinggi jika dibandingkan dengan target produksi sebesar 6.819 Ton. Capaian produksi peternakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar 6.939,63 Ton dan tahun 2024 sebesar 6.802,62 Ton. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain: 1. Dampak dari adanya penyebaran penyakit ternak seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD) pada sapi yang dapat menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi bagi peternak dikarenakan turunnya harga jual ternak paska tertular PMK, juga merebaknya penyakit *African Swine Fever* (ASF) yang menyerang ternak babi dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar pada ternak babi yang dipelihara masyarakat. 2. Beralihnya pola konsumsi daging. Penjualan daging beku yang semakin mudah didapat, dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan daging segar membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli daging beku. Hal ini menyebabkan peternak mengalami kesulitan dalam menjual ternaknya sehingga membatasi jumlah ternak yang dipelihara. 3. Jumlah peternak ayam broiler semakin berkurang. Hal ini dikarenakan semakin tingginya biaya produksi yang memberatkan



bagi peternak mandiri skala kecil. Ditambah dengan turunnya harga jual pada saat panen. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging ayam didatangkan ayam broiler dari luar kabupaten sambas, terutama dari peternakan skala besar dan modern.

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Sebagai upaya pemecahan masalah dan kendala dalam pencapaian sasaran startegis meningkatnya produksi perikanan, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan intervensi berupa pemberian Hibah Barang kepada nelayan dan pelaku pengolahan di Kabupaten Sambas, seperti mesin, alat tangkap, sarana dan prasarana tangkap, dan sarana parsaran pengolahan.

Selain itu, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan juga berupaya untuk terus mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Pusat agar Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mengkoordinir setiap usulan hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten Sambas, serta juga terus berupaya mensikronisasi kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD dengan Program Unggulan yang ada pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa kegiatan yang diusulkan melalui musrenbang RKPD Kabupaten diserahkan ke Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti karena memang kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengampu kegiatan tersebut.

Analisis Kinerja

Keberhasilan kinerja suatu organisasi tidak hanya dilihat dari capaian kinerjanya saja, melainkan pula dapat dilihat dari seberapa efisien suatu organisasi menggunakan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja tersebut. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Pengukuran efisiensi terhadap penggunaan sumber daya pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tingkat Efisiensi
			Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024		
1	Meningkatnya Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.165.973.410	5.871.012.666	100,00%	95,22%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.097.678.268	4.524.119.101	226,48%	88,75%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.521.530.580	2.198.200.320	137,56%	87,18%
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	217.790.868	187.369.095	100,00%	86,03%
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	809.495.829	646.470.513	68,69%	79,86%
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.026.959.559	344.499.759	93,80%	33,55%
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	81.150.000	374.754.072	100,00%	98,32%
Rata-Rata					118,08%	87,18%

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa proses pencapaian kinerja pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dikatakan sangat efisien. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja tiap program yakni sebesar 118,08%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata persentase realisasi anggaran yakni sebesar 87,18%.

Pencapaian kinerja sasaran strategis perlu didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja itu sendiri. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja



sasaran strategis pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)		REALISASI	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.565.207.781	6.165.973.410	5.871.012.666	95,22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.113.185	192.903.045	192.720.695	99,91
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.702.709,00	70.726.634	70.669.234	99,92
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.428.205	5.428.205	5.428.205	100,00
	1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.605.350	3.605.350	3.605.350	100,00
	1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.868.063	5.868.063	5.868.063	100,00
	1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.413.645	3.413.645	3.413.645	100,00
	1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.637.983	3.081.983	3.081.983	100,00
	1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.457.230	100.779.165	100.654.215	99,88
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.174.636.345	3.929.375.411	3.840.426.238	97,74
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.738.983.560	3.498.027.362	3.415.074.076	97,63
	1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	412.320.000	414.440.000	412.940.000	99,64
	1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.820.603	6.395.867	1.899.980	29,71
	1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.512.182	10.512.182	10.512.182	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81.776.583	84.201.306	83.744.924	99,46
	1.3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	81.776.583	84.201.306	83.744.924	99,46
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.640.000	49.640.000	46.678.415	94,03
	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.640.000	49.640.000	46.678.415	94,03
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	482.016.473	521.153.473	433.281.140	83,14
	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.788.908	22.388.908	22.383.908	99,98
	1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	0	0	0
	1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.282.165	13.182.165	13.035.178	98,88
	1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.221.213	31.221.213	31.221.213	100,00



	1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.408.187	45.408.187	44.691.206	98,42
	1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.450.000	66.450.000	66.450.000	100,00
	1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.866.000	342.503.000	255.499.635	74,60
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.312.000	31.380.000	30.660.000	97,71
	1.6.1	Pengadaan Mebel	0	0	0	0
	1.6.2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	37.000.000	31.380.000	30.660.000	97,71
	1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.312.000	0	0	0
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975.348.078	975.145.408	936.506.171	96,04
	1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.846.500	5.846.500	5.846.500	100,00
	1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.357.828	161.845.158	152.401.355	94,16
	1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.143.750	807.453.750	778.258.316	96,38
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.496.150	354.305.800	295.026.716	83,27
	1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.746.150	342.605.800	283.516.936	82,75
	1.8.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.750.000	11.700.000	11.509.780	98,37
	1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
	1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0
9		Penataan Organisasi	27.868.967	27.868.967	11.968.367	42,95
	1.9.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	27.868.967	27.868.967	11.968.367	42,95
2		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.410.686.436	5.097.678.268	4.524.119.101	88,75
1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.310.686.807	4.997.678.639	4.442.826.742	88,90
	2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	219.989.968	219.989.900	216.867.231	98,58
	2.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.198.165.897	1.198.165.897	1.174.840.642	98,05
	2.1.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.892.530.942	3.579.522.842	3.051.118.869	85,24
2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.999.629	99.999.629	81.292.359	81,29
	2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	49.999.697	49.999.697	49.984.697	99,97
	2.2.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	49.999.932	49.999.932	31.307.662	62,62
	2.2.3	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0			
3		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	0	0	0



	2.3.1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	0	0	0
	2.3.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	0	0	0
4		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	2.4.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0	0	0	00
3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.773.299.996	2.521.530.580	2.193.520.320	86,99
1		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.419.321	13.419.321	13.419.321	100,00
	3.1.1	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	13.419.321	13.419.321	13.419.321	100,00
2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	115.846.380	64.863.740	59.290.940	91,41
	3.2.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	46.211.340	41.611.340	40.943.540	98,40
	3.2.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	7.027.950	7.027.950	2.332.950	33,20
	3.2.3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0	6.795.750	6.615.750	97,35
	3.2.3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	55.811.340	9.428.700	9.398.700	99,68
3		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	3.3.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.644.034.295	2.443.247.519	2.120.810.059	86,80
	3.4.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.079.750	106.079.750	30.778.050	29,01
	3.4.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.168.646.886	1.136.956.110	1.127.868.166	99,20



		3.4.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	965.872.918	705.512.918	473.479.702	67,11
		3.4.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.025.779	7.025.779	4.805.779	68,40
		3.4.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	418.688.874	52.720.088	49.075.088	93,09
		3.4.6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0	0	0	0
		3.4.7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	418.688.874	434.952.874	434.803.274	99,97
4			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	199.998.368	217.790.868	187.369.095	86,03
	1		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	199.998.368	217.790.868	187.369.095	86,03
		4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	199.998.368	217.790.868	187.369.095	86,03
		4.1.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0	0	0	0
5			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	679.833.056	809.495.829	646.470.513	79,86
	1		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	177.404.435	220.504.435	220.504.435	100,00
		5.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	177.404.435	220.504.435	220.504.435	100,00
	2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	502.428.621	588.991.394	425.966.078	72,32
		5.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	202.088.690	366.201.463	204.338.147	55,80
		5.2.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.339.931	222.789.931	221.627.931	99,48
6			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.635.359.539	1.026.959.559	344.499.759	33,55
	1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	99.999.666	0	0	0
		6.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	99.999.666	0	0	0
	2		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur	0	0	0	0
		6.2.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	0	0	0	0
	3		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	0	518.649.215	49.568.615	9,56



		Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	6.3.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	0	518.649.215	49.568.615	9,56
	6.2.2	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	0	0	0	0
3		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.535.359.873	508.310.344	294.931.144	58,02
	6.3.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.535.359.873	508.310.344	294.931.144	58,02
7		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	0	0	0
1		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	0	0	0	0
	7.1.1	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	0	0	0	0
8		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	381.150.000	381.150.000	374.754.072	98,32
1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	8.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0	0	0	0
2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	8.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	0	0	0	0
3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	381.150.000	381.150.000	374.754.072	98,32
	8.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	381.150.000			
4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	0	0
	8.4.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0	0	0	0
9		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0	0	0	0
1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	9.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	0	0	0	0
Total			17.645.535.176	16.220.578.514	14.141.745.526	87,18

C. Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 setelah perubahan adalah sebesar Rp 14.141.745.526 atau sebesar 87,18%



dari total anggaran Rp 16.220.578.514,00. Dengan demikian penggunaan anggaran APBD dalam pencapaian strategis dinilai sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Persentase %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.165.973.410	5.871.012.666	95,22%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.097.678.268	4.524.119.101	88,75%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.521.530.580	2.198.200.320	87,18%
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	217.790.868	187.369.095	86,03%
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	809.495.829	646.470.513	79,86%
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.026.959.559	344.499.759	33,55%
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	381.150.000	374.754.072	98,32%



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat pencapaian strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas tahun 2024 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, jika diambil rata-rata persentase maka capaian kinerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah sebesar 159,32% dengan kategori Sangat Berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi DPPKH Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Sambas.

B. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja, terutama pada indikator kinerja yang capaiannya belum optimal. Peningkatan produksi perikanan dan peternakan merupakan tantangan bagi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan perikanan dan peternakan di pusat-pusat sentra dan terintegrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut meningkat dan berpengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan dan peternakan.
2. Meningkatkan jumlah Percontohan perikanan baik di media pemeliharaan di Kolam, KJA dan Tambak.



3. Meningkatkan cara budidaya ikan yang baik dan secara intensif dengan penerapan pembudidayaan ikan secara Modern.
4. Meningkatkan perluasan wilayah pemanfaatan lahan Tambak dengan menggunakan metode Pemeliharaan secara intensif.
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendataan Produksi Perikanan dan Peternakan dilapangan dengan meningkatkan Kinerja Penyuluh Lapangan dan Petugas Enumerator agar data yang disampaikan akurat dan terwakili disetiap Wilayah yang potensi menghasilkan Produksi Perikanan dan Peternakan.
6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM perikanan dan peternakan melalui diklat/bimtek.
7. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh pembudidaya ikan dan peternakan.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP DPPKH Kabupaten Sambas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja DPPKH Kabupaten Sambas memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sitem perencanaan pembangunan. Peran serta seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dalam proses perencanaan pembangunan merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sambas.

Akhir kata, semoga LAKIP tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan dapat menjadi sumber informasi penting dalam penyusunan LAKIP di tingkat Pemerintah Kabupaten Sambas.



Sambas, Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN
SAMBAS




HENDY WIJAYA, S.K.M., M.PH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690824 198911 1 001